



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 39 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGUNAAN NOMOR POLISI UNTUK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA  
MAKASSAR DAN INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu menetapkan Penggunaan Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 105).

#### **M E M U T U S K A N   :**

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI UNTUK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR.**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Nomor Polisi adalah Plat Aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah terdaftar pada Kantor bersama Samsat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penggunaan Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Vertikal di Kota Makassar dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan nomor polisi kendaraan dinas di daerah.
- (2) Tujuan penomoran adalah untuk kepentingan protokoler, kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan serta untuk tertib administrasi penggunaan nomor polisi kendaraan dinas dalam daerah.

## **BAB III PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 3**

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DD), nomor polisi (angka), tanda pengenal huruf (huruf A) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.



#### **Pasal 4**

Penomoran kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Penomoran Kendaraan Dinas roda empat untuk Pejabat Administrasi pada masing-masing Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Penomoran kendaraan Dinas masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah, berdasarkan angka depan pada nomor polisi kendaraan dinas masing-masing Perangkat Daerah.

#### **Pasal 6**

Penggunaan nomor kendaraan dinas selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diserahkan pengaturannya kepada Kepolisian Daerah u.p Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Administrasi dan Biaya sehubungan dengan penerbitan tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan bermotor menjadi beban masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kota Makassar.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 20 Nopember 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 20 Nopember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**BASO AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR : 39

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGUNAAN NOMOR POLISI UNTUK KENDARAAN  
DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN  
INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR

**NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN  
INSTANSI VERTIKAL DI KOTA MAKASSAR**

| No. | Jabatan  | Nomor Polisi | Keterangan |
|-----|--|--------------|------------|
| 1   | 2  | 3            | 4          |
| 1.  | Walikota Makassar  | DD 1 A       |            |
| 2.  | Wakil Walikota Makassar  | DD 2 A       |            |
| 3.  | Ketua DPRD Kota Makassar   | DD 3 A       |            |
| 4.  | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar                                | DD 4 A       |            |
| 5.  | Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar                                | DD 5 A       |            |
| 6.  | Ketua Pengadilan Negeri TUN Kota Makassar                            | DD 6 A       |            |
| 7.  | Sekretaris Daerah Kota Makassar                                      | DD 7 A       |            |
| 8.  | Asisten Bidang Pemerintahan  | DD 8 A       |            |
| 9.  | Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan                               | DD 9 A       |            |
| 10. | Asisten Bidang Administrasi  | DD 10 A      |            |
| 11. | Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar                                     | DD 11 A      |            |
| 12. | Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar                                    | DD 12 A      |            |
| 13. | Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar                                   | DD 13 A      |            |
| 14. | Sekretaris DPRD  | DD 14 A      |            |
| 15. | Inspektorat  | DD 15 A      |            |
| 16. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | DD 16 A      |            |
| 17. | Kepala Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah                        | DD 17 A      |            |



| No. | Jabatan   | Nomor Polisi | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------|
| 1   | 2   | 3            | 4          |
| 18. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah | DD 18 A      |            |
| 19. | Kepala Badan Pendapatan Daerah                  | DD 19 A      |            |
| 20. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah      | DD 20 A      |            |
| 21. | Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Daerah   | DD 21 A      |            |
| 22. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik          | DD 22 A      |            |
| 23. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja               | DD 23 A      |            |
| 24. | Kepala Dinas Pendidikan                         | DD 24 A      |            |
| 25. | Kepala Dinas Kesehatan                          | DD 25 A      |            |
| 26. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum                     | DD 26 A      |            |
| 27. | Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman     | DD 27 A      |            |
| 28. | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran                  | DD 28 A      |            |
| 29. | Kepala Dinas Sosial                             | DD 29 A      |            |
| 30. | Kepala Dinas Ketenagakerjaan                    | DD 30 A      |            |
| 31. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Anak      | DD 31 A      |            |
| 32. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan                   | DD 32 A      |            |
| 33. | Kepala Dinas Pertanahan                         | DD 33 A      |            |
| 34. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                   | DD 34 A      |            |
| 35. | Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil    | DD 35 A      |            |

| No. | Jabatan                                   | Nomor Polisi | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------|
| 1   | 2   | 3            | 4          |
| 36. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB | DD 36 A      |            |
| 37. | Kepala Dinas Perhubungan                  | DD 37 A      |            |
| 38. | Kepala Dinas Komunikasi & Informatika     | DD 38 A      |            |
| 39. | Kepala Dinas Koperasi & UKM               | DD 39 A      |            |
| 40. | Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP       | DD 40 A      |            |
| 41. | Kepala Dinas Pemuda & Olahraga            | DD 41 A      |            |
| 42. | Kepala Dinas Kebudayaan                   | DD 42 A      |            |
| 43. | Kepala Dinas Perpustakaan                 | DD 43 A      |            |
| 44. | Kepala Dinas Kearsipan                    | DD 44 A      |            |
| 45. | Kepala Dinas Perikanan & Pertanian        | DD 45 A      |            |
| 46. | Kepala Dinas Pariwisata                   | DD 46 A      |            |
| 47. | Kepala Dinas Perdagangan                  | DD 47 A      |            |
| 48. | Kepala Dinas Penataan Ruang               | DD 48 A      |            |
| 49. | Staf Ahli Walikota                        | DD 49 A      |            |
| 50. | Staf Ahli walikota                        | DD 50 A      |            |
| 51. | Staf Ahli Walikota                        | DD 51 A      |            |
| 52. | Staf Ahli Walikota                        | DD 52 A      |            |
| 53. | Kepala Kantor BPN Kota Makassar           | DD 53 A      |            |



| <b>No.</b> | <b>Jabatan</b>                               | <b>Nomor Polisi</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                     | <b>3</b>            | <b>4</b>          |
| 54.        | Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar | DD 54 A             |                   |
| 55.        | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat            | DD 55 A             |                   |
| 56.        | Kepala Bagian Hukum                          | DD 56 A             |                   |
| 57.        | Kepala Bagian Perekonomian & Kerjasama       | DD 57 A             |                   |
| 58.        | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat           | DD 58 A             |                   |
| 59.        | Kepala Bagian Protokol                       | DD 59 A             |                   |
| 60.        | Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat        | DD 60 A             |                   |
| 61.        | Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan         | DD 61 A             |                   |
| 62.        | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana    | DD 62 A             |                   |
| 63.        | Kepala Bagian Tata Pemerintahan              | DD 63 A             |                   |
| 64.        | Kepala Bagian Perlengkapan                   | DD 64 A             |                   |
| 65.        | Kepala Bagian Umum                           | DD 65 A             |                   |
| 66.        | Kepala Bagian Keuangan                       | DD 66 A             |                   |
| 67.        | Camat Biringkanaya                           | DD 67 A             |                   |
| 68.        | Camat Bontoala                               | DD 68 A             |                   |
| 69.        | Camat Mamajang                               | DD 69 A             |                   |
| 70.        | Camat Manggala                               | DD 70 A             |                   |
| 71.        | Camat Mariso                                 | DD 71 A             |                   |



| No. | Jabatan                                     | Nomor Polisi | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------|
| 1   | 2   | 3            | 4          |
| 72. | Camat Panakukang                            | DD 72 A      |            |
| 73. | Camat Rappocini                             | DD 73 A      |            |
| 74. | Camat Makassar                              | DD 74 A      |            |
| 75. | Camat Ujung Pandang                         | DD 75 A      |            |
| 76. | Camat Ujung Tanah                           | DD 76 A      |            |
| 77. | Camat Wajo                                  | DD 77 A      |            |
| 78. | Camat Tamalate                              | DD 78 A      |            |
| 79. | Camat Tallo                                 | DD 79 A      |            |
| 80. | Camat Tamalanrea                            | DD 80 A      |            |
| 81. | Camat Kep. Sangkarrang                      | DD 81 A      |            |
| 82. | Direktur Utama PDAM                         | DD 82 A      |            |
| 83. | Direktur Utama PD.Parkir                    | DD 83 A      |            |
| 84. | Direktur Utama PD.Pasar                     | DD 84 A      |            |
| 85. | Direktur Utama PD.Terminal                  | DD 85 A      |            |
| 86. | Direktur Utama PD.BPR                       | DD 86 A      |            |
| 87. | Direktur Utama PD.RPH                       | DD 87 A      |            |
| 88. | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar       | DD 88 A      |            |
| 89. | Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar | DD 89 A      |            |



| <b>No.</b> | <b>Jabatan</b>                              | <b>Nomor Polisi</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                    | <b>3</b>            | <b>4</b>          |
| 90.        | Ketua Dharma Wanita Kota Makassar           | DD 90 A             |                   |
| 91.        | Mobil Operasional Walikota                  | DD 91 A             |                   |
| 92.        | Mobil Operasioal Wakil Walikota             | DD 92 A             |                   |
| 93.        | Mobil Operasional Sekeretaris Kota Makassar | DD 93 A             |                   |
| 94.        | Ketua Komisi Pemilihan Umum                 | DD 94 A             |                   |
| 95.        | Ketua Panitia Pengawas Pemilu               | DD 95 A             |                   |
| 96.        | Akan Diatur Kemudian                        | DD 96 A             |                   |
| 97.        | Akan Diatur Kemudian                        | DD 97 A             |                   |
| 98.        | Akan Diatur Kemudian                        | DD 98 A             |                   |
| 99.        | Akan Diatur Kemudian                        | DD 99 A             |                   |

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**